



PENGANTAR FORUM PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENSTRA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

RABU, 24 MARET 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RENSTRA

Maksud:

- 1. Penyesuaian kondisi lingkungan strategis (tuntutan TI dan kondisi pandemi)**
- 2. Penyesuaian regulasi (Kepmendagri No.050-3708 dan angka dasar penghitungan nilai sistem merit)**

Tujuan :

- 1. Menetapkan jumlah dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terbaru sesuai Kepmendagri No.050-3708 dalam penyelenggaraan Tupoksi BKD Prov Jateng selama periode RPJMD tersisa tahun 2022-2023;**
- 2. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKD Prov Jateng Tahun 2022;**
- 3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan bidang kepegawaian baik tahunan maupun lima tahunan disisa masa berlaku RPJMD;**
- 4. Kerangka koordinasi Prog/Kegiatan dengan Pusat dan Kab/Kota (terutama 21 Kab/Kota yang sedang sedang menyusun RPJMD pasca pilkada serentak.**

TUPOKSI BKD PROVINSI JAWA TENGAH

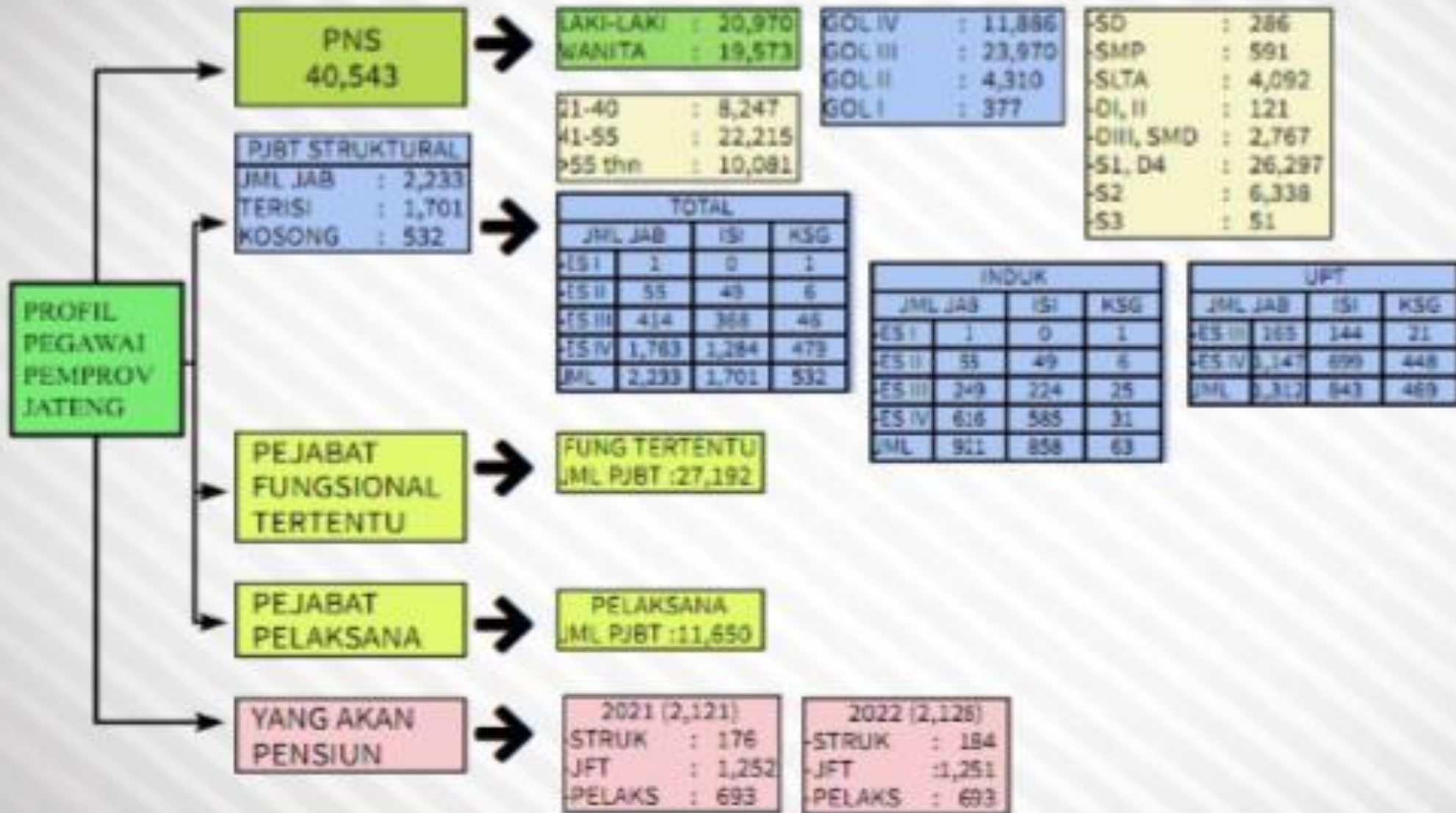
TUGAS POKOK

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI

- 1. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan pembinaan teknis dan administrasi di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;**
- 2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

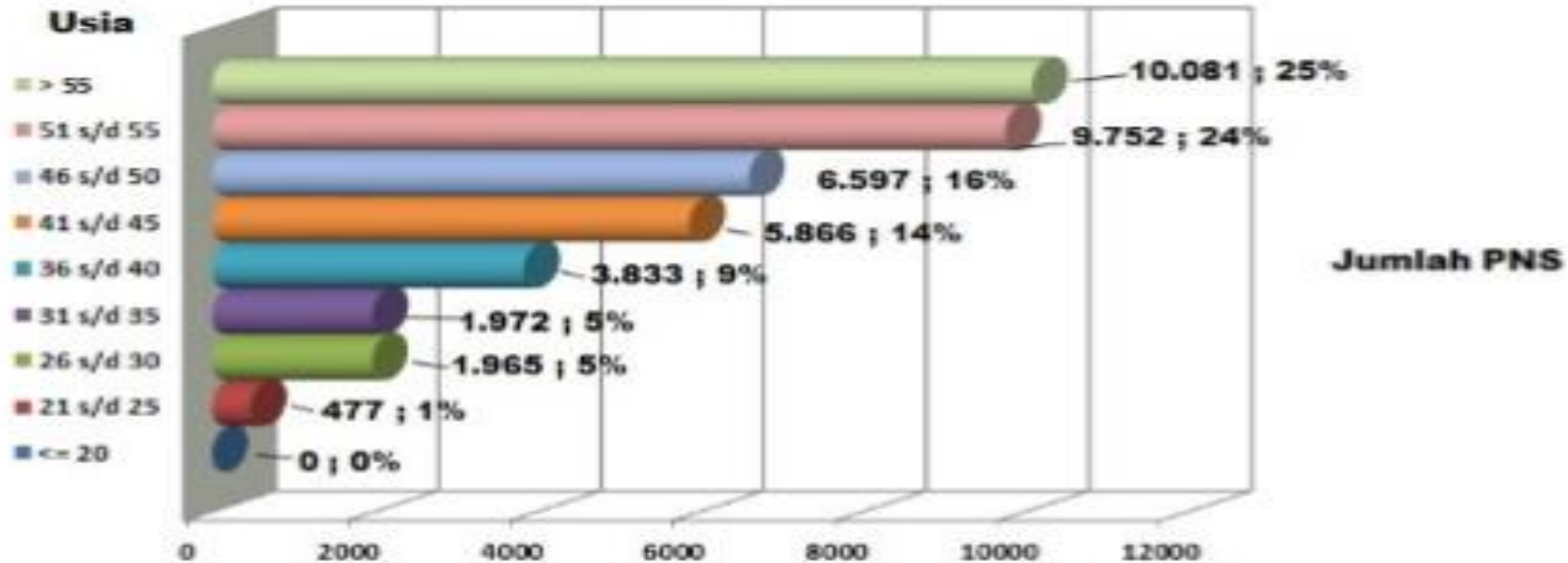
PROFIL PEGAWAI PEMPROV JATENG



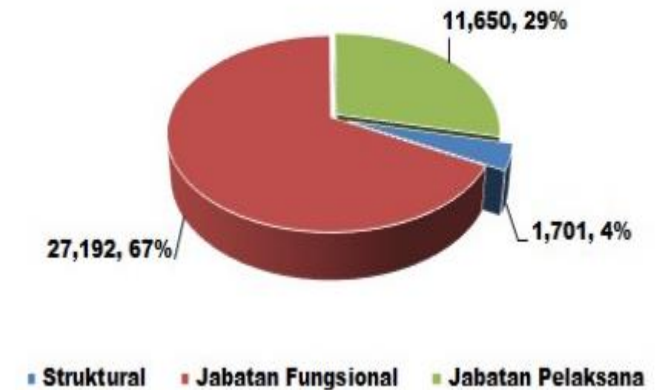
Data Per 31 Desember 2020

Sumber: BKD Prov Jateng

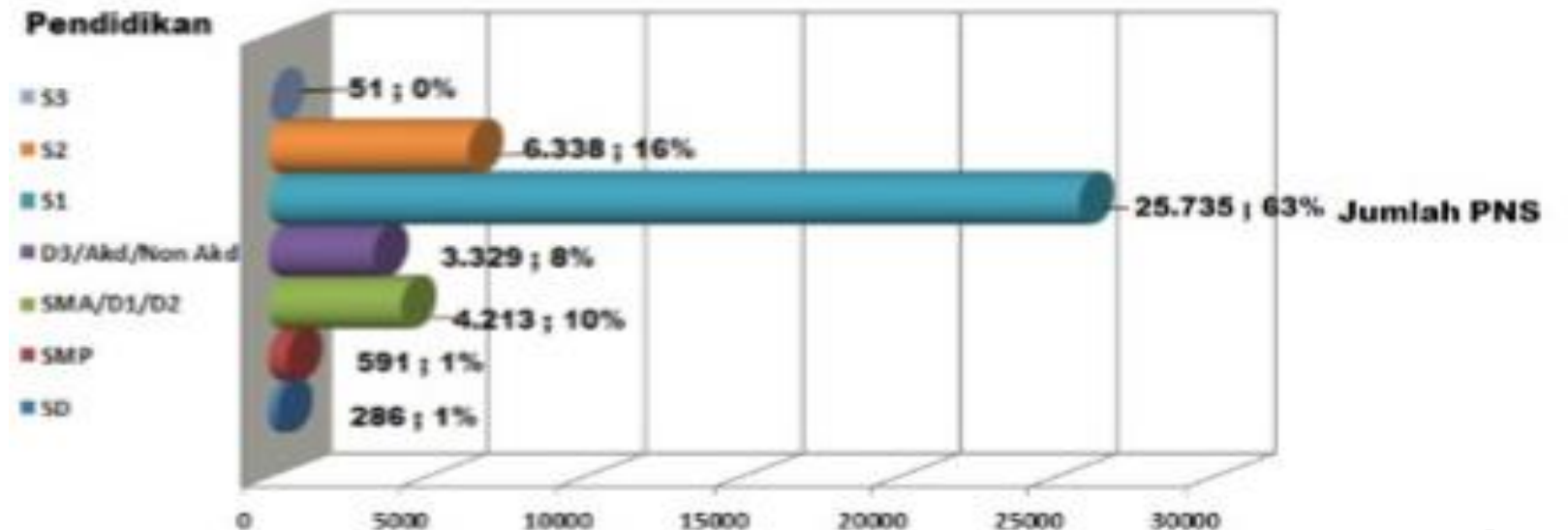
PNS Berdasarkan Usia



PNS berdasarkan Jabatan



PNS Berdasarkan Pendidikan



Sumber: BKD Prov Jateng

LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJMD

Keselarasan dg Prioritas Nasional dengan diterbitkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

Dinamika Peraturan Perundangan yang mempengaruhi substansi RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya

Memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD utamanya pada capaian target indikator kinerja

Kondisi Lingkungan Strategis Khususnya Dampak Pandemi Covid 19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2018 – 2023



2019

Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek,



2020

Kat kesejahteraan masy didukung Kat Kualitas Hidup & Kapasitas SDM,

2022

Penguatan kesejahteraan & perekonomian masy didukung penguatan daya saing ekonomi daerah, **disesuaikan menjadi** “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”



2021

Kat kesejahteraan dan perekonomian masy didukung penguatan daya saing SDM, **disesuaikan menjadi** “Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”

2023

“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”



TANTANGAN NASIONAL MENUJU PENGEMBANGAN SDM APARATUR

**KONDISI
SAAT INI**
4,35 Juta ASN

Internal:

- **Missmatch**
- **Indisipliner**

Program Strategis:

- **Perencanaan**
- **Rekrutmen dan Seleksi**
- **Pengembangan Kapasitas**
- **Reformasi Kesejahteraan**

Eksternal:

- **Globalisasi dan Persaingan**
- **Tuntutan Publik**

**T
A
N
T
A
N
G
A
N**

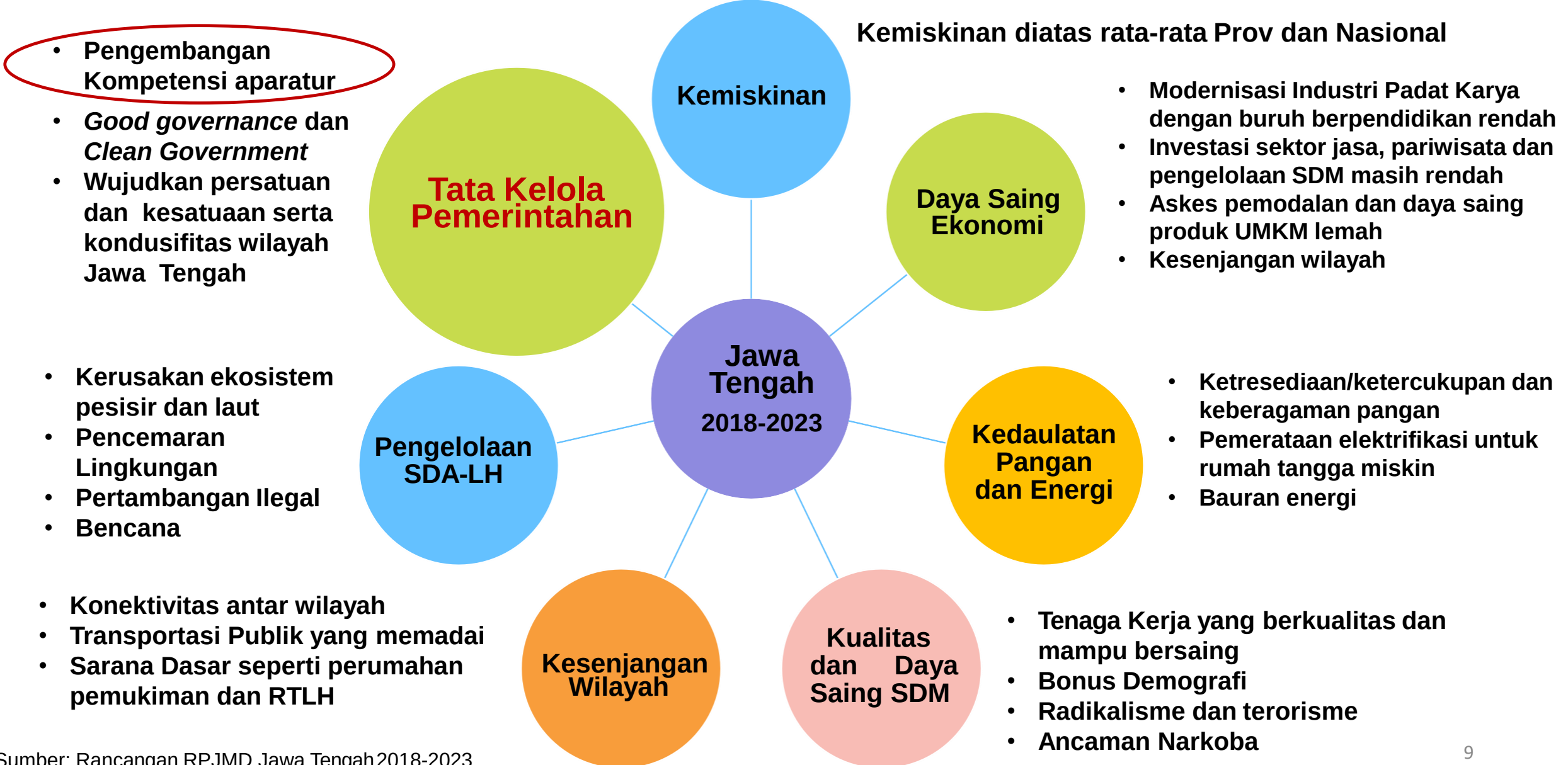
**SMART
ASN 2024**

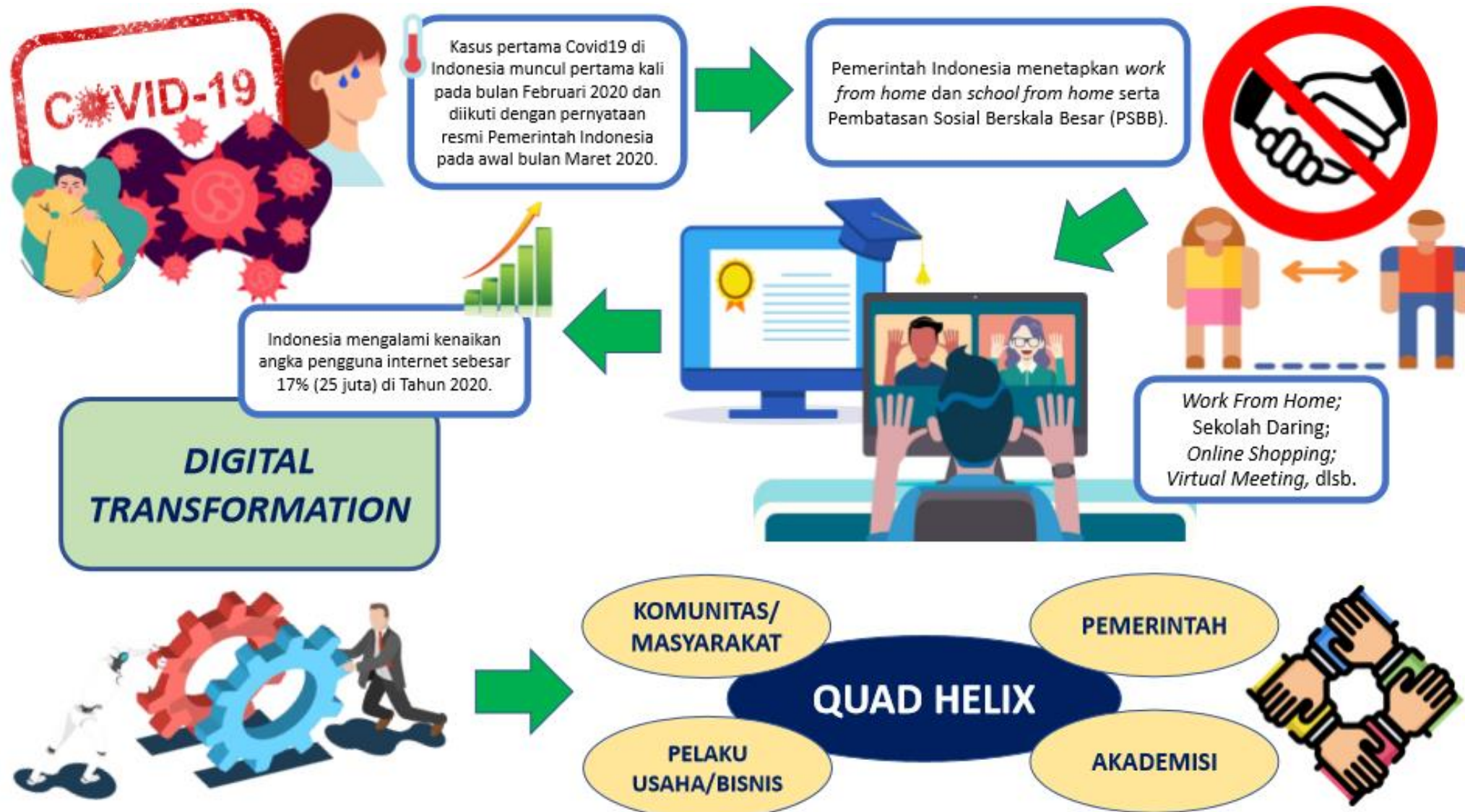
Profile:

- **Integritas**
- **Nasionalisme**
- **Wawasan Global**
- **IT & Bahasa Asing**
- **Hospitality
(Pelayanan)**
- **Networking (Jaringan)**
- **Entrepreneurship
(Kewirausahaan)**

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018-2023





Sumber: BAPPENAS 2021

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI TH.2020

I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ASPEK DAYA SAING PROV JAWA TENGAH TH. 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status
				Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C	Aspek Daya Saing							
15	Indeks Sistem Merit	0,71	0,70	0,70	0,7	0,7	98,59	▶

Keterangan :

● : Tercapai (Capaian 2020 $\geq$ 100 % dari Target RPJMD)

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 $\geq$ 30% & < 100 % dari Target RPJMD)

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

CAPAIAN NILAI SISTEM MERIT TAHUN 2020

Nilai 289
Indek 0,70



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 33/KEP.KASN/C/XI/2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KESATU

: Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 289 (dua ratus delapan puluh sembilan), dan Indeks 0,70 (nol koma tujuh nol).



II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENUNJANG PEM. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No,	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah								Badan Kepegawaian Daerah
1.	Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2.	Persentase PNS yang Meningkatkan Kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100,00	20,00	40	40,00	40,00	40		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
3.	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Mutasi
4.	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
5.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Dikembangkan dan Terintegrasi	100,00	20,00	40	40,00	40,00	40		Bidang Informasi Kepegawaian
6.	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	100,00	20,00	40	21,50	21,50	21,5		Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KEPMENDAGRI NOMOR 050.3708 TAHUN 2020

Tentang Pemutakhiran Permendagri 90/2019

- 
- Penyesuaian nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Perubahan Renstra PD 2018-2023
 - Penyesuaian arsitektur perencanaan pembangunan pada indikator kinerja semula 4 level (tujuan, sasaran, program dan kegiatan) menjadi 5 level (tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan)

PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN BKD PROV JATENG TH. 2021 SESUAI PERMENDAGRI 90/2019 & KEPMENDAGRI No.050-3708

NO	TAHUN 2019 / 2020		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	PROGRAM TAHUN 2019	JUMLAH KEGIATAN 2019	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	22 kegiatan	Program Kepegawaian Daerah	5 kegiatan	16 Sub Kegiatan	Program Kepegawaian Daerah	4 kegiatan	18 Sub Kegiatan
2	Prog Manajemen Administrasi Pelay Umum, kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	15 kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan	23 Sub Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 kegiatan	23 Sub Kegiatan
3	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 kegiatan						
	3 Program	39 Kegiatan	2 Program	9 Kegiatan	46 Sub Kegiatan	2 Program	12 Kegiatan	41 Sub Kegiatan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

TUJUAN RENSTRA

Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

SASARAN I

**Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan
(Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi)**

SASARAN II

Pengembangan Layanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi

STRATEGI

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun;
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK dan juga dari PNS mutasi dari instansi lain;
3. Pengembangan karier melalui manajemen talenta;
4. Promosi, Mutasi dan Rotasi secara objektif dan transparan;
5. Manajemen kinerja secara terukur;
6. Penggajian, penghargaan dan promosi berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN;
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan serta layanan dalam pelaksanaan tugas ASN;
8. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

ARAH KEBIJAKAN

TAHUN I

1. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur pengadaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian (Sinaga)
3. Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (e-kinerja).
4. Penyusunan tools pemetaan kompetensi ASN.
5. Penyusunan manajemen talenta

TAHUN II

1. Pemetaan kompetensi ASN.
2. Penyiapan talent pool untuk JPT.
3. Penataan pegawai sesuai peta jabatan dan kelas jabatan.
4. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis *online* terintegrasi dengan SIMPEG.
5. Pemenuhan sarpras IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian.

ARAH KEBIJAKAN (Lanjutan...)

TAHUN III

1. Pemetaan kompetensi ASN.
2. Pengembangan konsep manajemen talenta.
3. Pengembangan sistem informasi Tugas Belajar/Ijin Belajar.
4. Pengembangan data kepegawaian digital yang dapat diakses oleh seluruh ASN Pemprov Jateng.
5. Penguatan *Assesment Centre*.

TAHUN IV

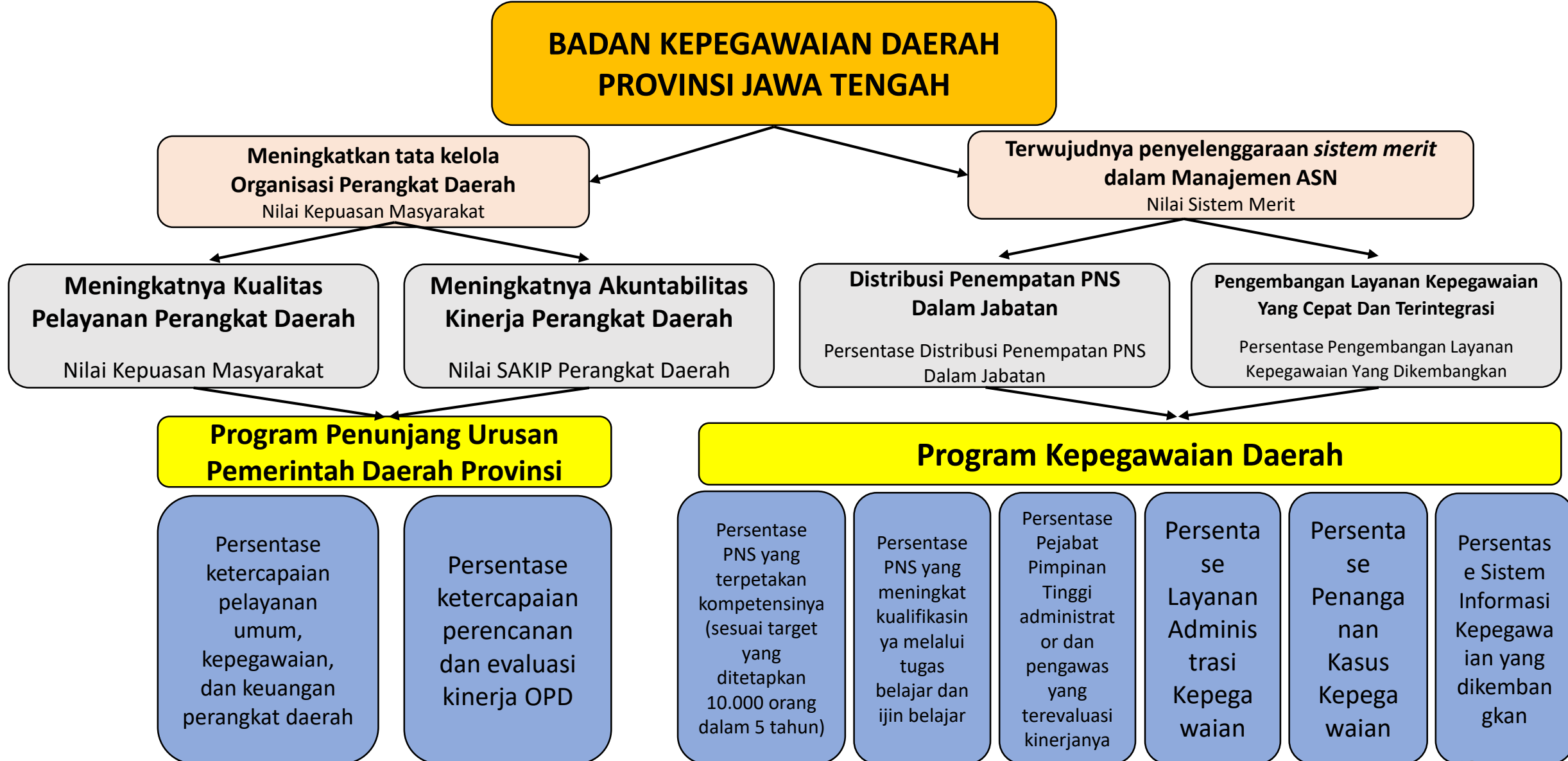
1. Pemetaan kompetensi ASN.
2. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional.
3. Penguatan pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN.
4. Pembinaan dan penanganan kasus kepegawaian berbasis sistem informasi.
5. Penghargaan dan perlindungan ASN.
6. Penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

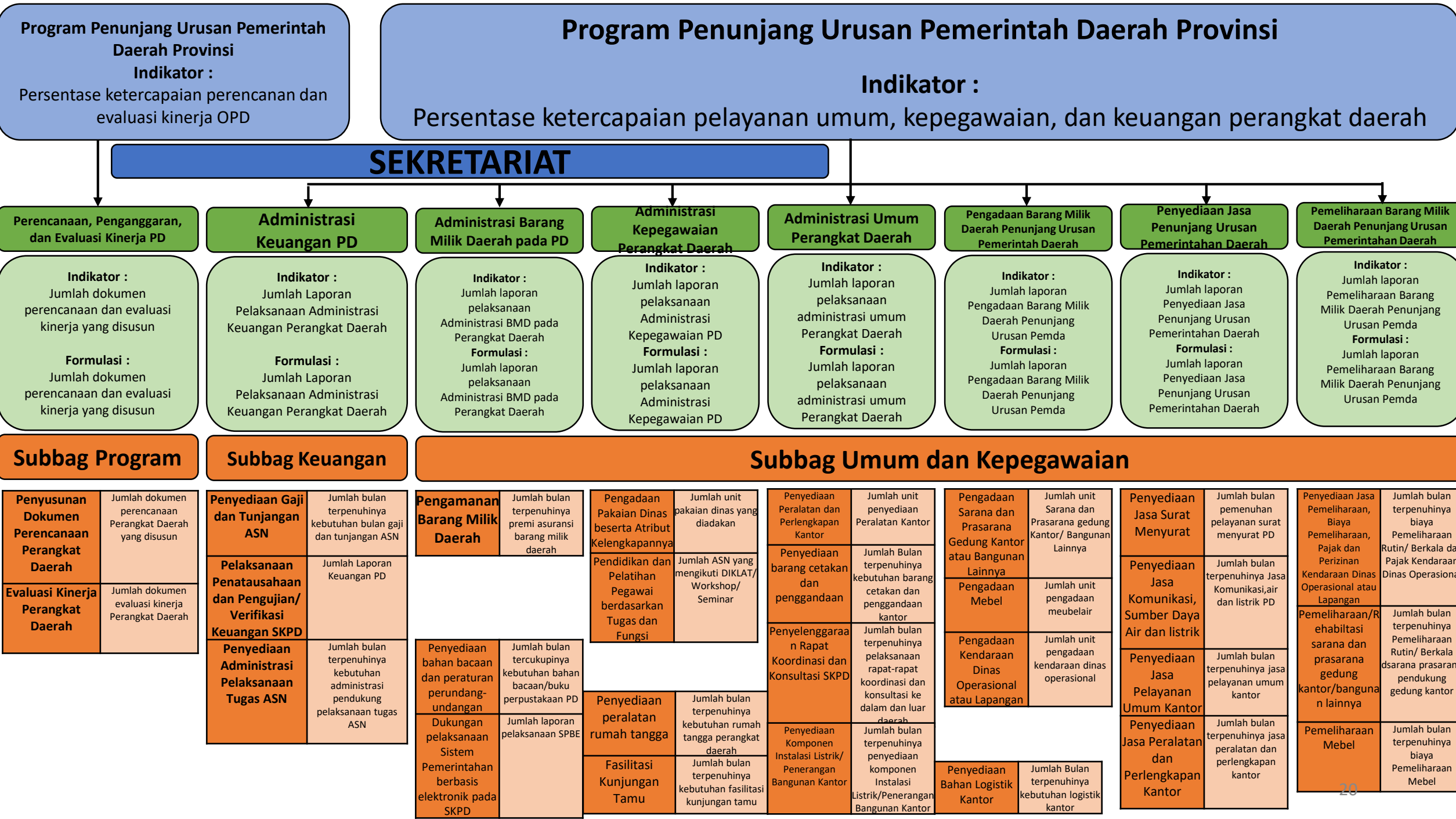
TAHUN V

1. Implementasi Manajemen Talent.
2. Penguatan single data simpeg terintegrasi.
3. Pengembangan portal layanan kepegawaian.
4. Penguatan layanan informasi dan dokumentasi kepegawaian.
5. Penguatan koordinasi dan evaluasi.
6. Pemantapan implementasi komponen sistem merit.

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RENSTRA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

MENGACU KEPMENDAGRI No. 050-3708 TAHUN 2020





Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar

Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi administrator dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator :

Persentase usulan formasi ASN

Formulasi :

Jumlah usulan formasi ASN tahun berjalan dibagi Jumlah ASN yang pensiun/purna tugas tahun berjalan x 100%

Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator :

Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi

Formulasi :

Jumlah PNS yang menempuh pendidikan formal dibagi Jumlah PNS yang lolos verifikasi usulan pendidikan formal x 100%

Mutasi dan Promosi ASN

Indikator :

Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan

Formulasi :

Jumlah Pejabat Struktural yang dilantik dibagi jumlah Formasi Jabatan Struktural yang diusulkan pelantikan pejabatnya x 100%

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator :

Persentase ASN yang dinilai PKSP

Formulasi :

Jumlah ASN yang dinilai PKSP dibagi jumlah seluruh ASN Pemprov Jateng x 100%

Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator :

Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional

Formulasi :

Jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik dibagi Jumlah Pejabat Fungsional yang diusulkan ke PPK untuk dilantik x 100%

Subbid Formasi dan Pengembangan

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)
	Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar
	Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar
	Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas
	Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas

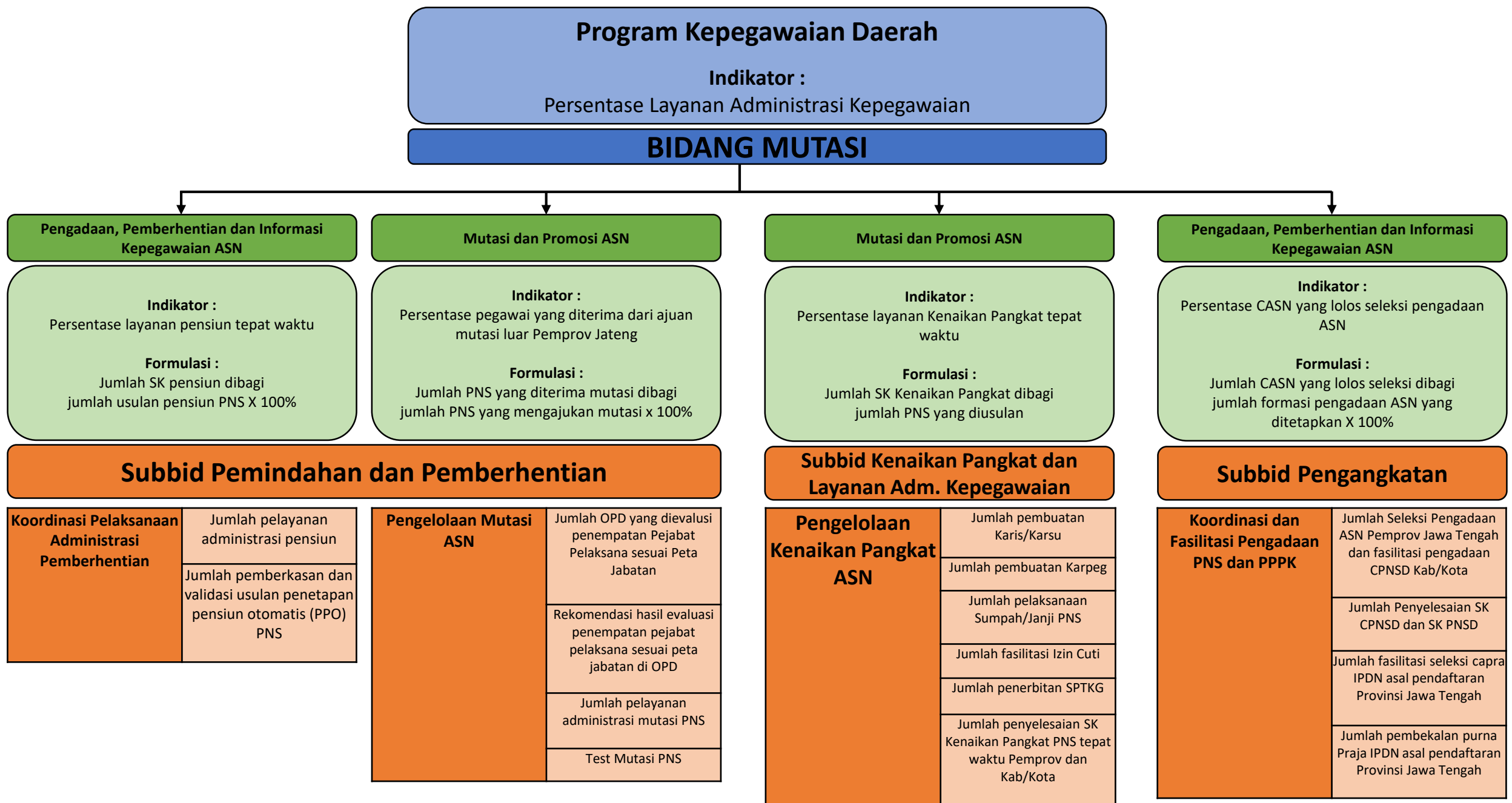
Subbid Jabatan Struktural

Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya
	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabse kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng
	Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas
	Jumlah PNS yang masuk Talent Pool

Subbid Pengembangan Jabatan Fungsional

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan
	Jumlah PAK yang ditetapkan
	Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional



Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator :

Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS

Formulasi :

Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS dibagi jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS x 100%

Subbid Kesejahteraan Pegawai

Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS
	Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS
	Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian
	Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator :

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya

Formulasi :

Jumlah ASN yang dinilai kedisiplinan kehadirannya dibagi Jumlah seluruh ASN Pemprov Jateng x 100%

Subbid Pembinaan

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.
	Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja
	Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS
	Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator :

Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik

Formulasi :

Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi Kode Etik dibagi Jumlah seluruh OPD Pemprov Jateng x 100%

Subbid Pengelola Korps Profesi ASN

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik
	Jumlah peserta apel siaga KORPRI

Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan

BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator :

Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian

Formulasi :

Jumlah OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian dibagi jumlah seluruh OPD Pemprov Jateng x 100%

Indikator :

Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan

Formulasi :

Jumlah data kepegawaian yang terdokumentasi secara digital dibagi jumlah dokumentasi data digital kepegawaian yang ditargetkan x 100%

Subbid Pengelola Data Kepegawaian

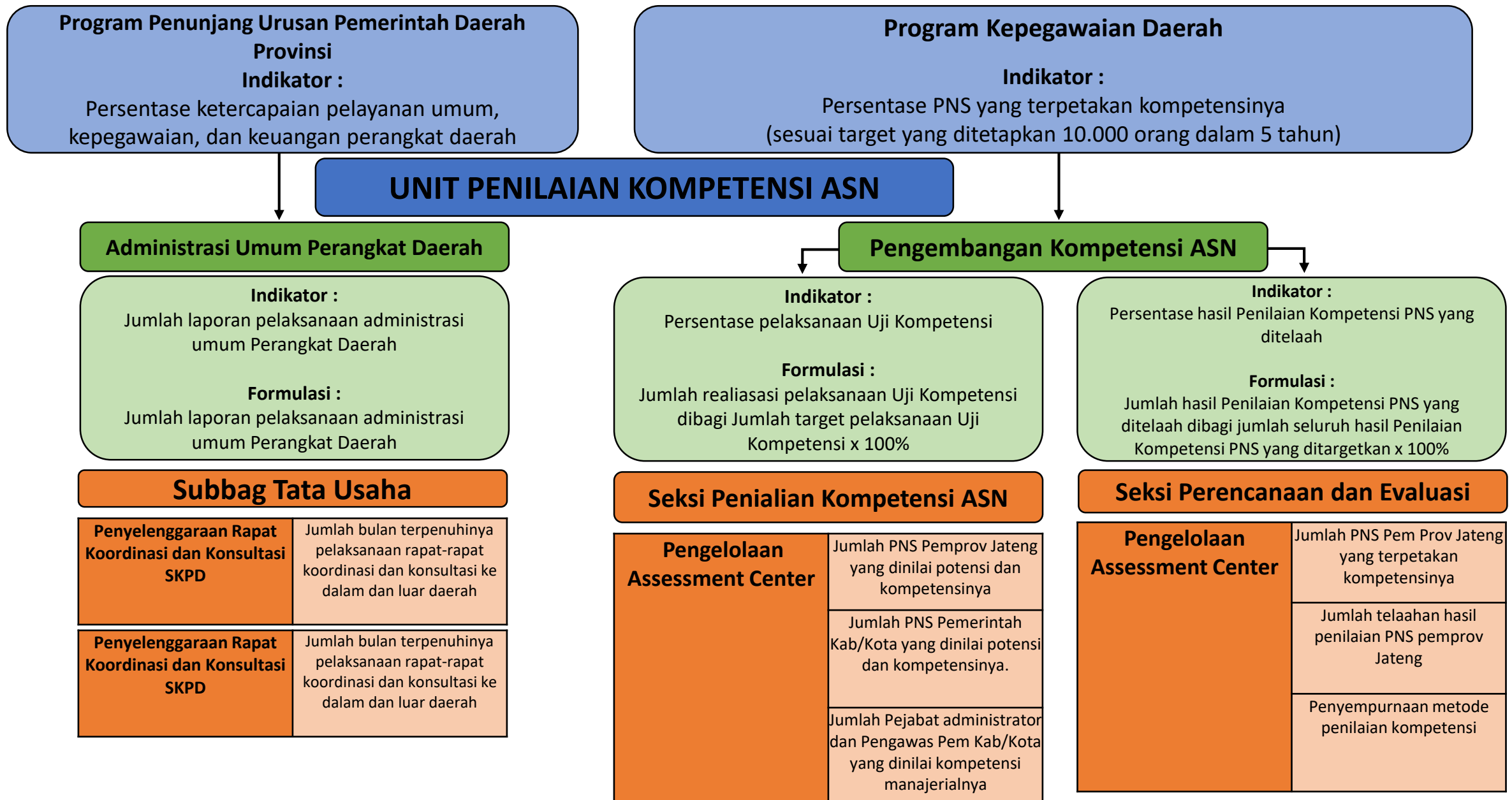
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg
Jumlah dokumentasi profil kepegawaian
Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian
Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg
Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan
Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK

Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian

Pengelolaan Data Kepegawaian

Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomafolder)
Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital
Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)



SUBSTANSI PERUBAHAN RENSTA

- 1. Penyesuaian angka dasar penghitungan nilai sistem merit oleh KASN;**
- 2. Penyesuaian jumlah dan nomenkatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020;**
- 3. Penyesuaian kebijakan di tahun ke IV dan V sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi 1 tahun terakhir yang berimplikasi pada pola sistem kerja dan penguatan penggunaan sistem informasi layanan kepegawaian berbasis *on line system*;**
- 4. Tindaklanjut penyelesaian hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai tahun terakhir.**

HARAPAN

- 1. Masukan terhadap substansi rancangan perubahan Renstra dari para narasumber dan peserta sidang yang hadir**
- 2. Terimplementasikannya amanah Kepmendagri 050 dalam cascading indikator kinerja di dokumen perubahan Renstra**
- 3. Prioritas lintas sektor dengan OPD terkait (3 pilar dan diskominfo) dapat semakin optimal dalam upaya tindaklanjut hasil rekomendasi penilaian sistem merit oleh KASN**
- 4. Mendorong 21 Kab/Kota yang Pilkada tahun 2020 untuk menuangkan indikator sistem merit dalam RPJMD/Renstra-nya sebagai keselarasan perencanaan pusat-daerah**
- 5. Rancangan perubahan Renstra mampu mengakomodasi peningkatan layanan kepegawaian sesuai prioritas dan perkembangan lingkungan strategis.**

TERJMA KASJH

